

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan dan Kelautan telah menetapkan visi dan misi yang erat kaitannya dengan upaya pencapaian visi Jawa Barat serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangka menjabarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut di atas, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat telah melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terstruktur berdasarkan pedoman serta landasan-landasan filosofis dan teknis yang berlaku, di antaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018; dan
2. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 – 2018.

Dari pedoman dan dasar-dasar filosofis tersebut, selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan program/kegiatan, maka selama kurun waktu Tahun 2016 telah dilakukan proses penyusunan rencana secara bertahap, yaitu sejak penjaringan kegiatan melalui Musrenbang, penyusunan Arah Kebijakan Umum (AKU), Nota Kesepakatan Anggaran, penyusunan rencana pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Barat baik yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat telah berupaya dalam melakukan *good governance* dengan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan berperan sebagai agen perubahan dalam manajemen pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Barat yang selalu meningkatkan sinergitas bersama masyarakat dan dunia usaha. Maka dari itu, dalam praktek *good governance* diperlukan penilaian indikator keberhasilan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 mengacu pada:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perikanan;
17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010; dan
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

20. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2.05.01 Tanggal 7 Januari 2016.
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (01) Dana Dekonsentrasi No. SP DIPA - 032.01.3.026221/2016 tanggal 7 Desember 2015.
22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) Dana Dekonsentrasi No. SP DIPA - 032.03.3.029088/2016 tanggal 7 Desember 2015.
23. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (03) Dana Tugas Perbantuan No. SP DIPA - 032.03.4.029172/2016 tanggal 7 Desember 2015.
24. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (04) Dana Dekonsentrasi No. DIPA - 032.04.3.029089/2016 tanggal 7 Desember 2016.
25. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (04) Dana Tugas Perbantuan No. SP DIPA - 032.04.4.029173/2016 tanggal 7 Desember 2016.
26. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (05) Dana Dekonsentrasi No. SP DIPA - 032.05.3.029090/2015 tanggal 7 Desember 2015.
27. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (06) Dana Dekonsentrasi No. DIPA - 032.06.3.029091/2016 tanggal 7 Desember 2015.
28. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (07) Dana Dekonsentrasi No. DIPA - 032.07.3.029092/2016 tanggal 7 Desember 2015.

1.3 Tujuan Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan maksud dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

1. Melaporkan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat dan pihak yang berkepentingan, sebagai bentuk pertanggung-jawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Memberikan informasi kinerja Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada peraturan perundangan, kebijakan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat untuk tahun berikutnya dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

1.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang perikanan dan eksplorasi kelautan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi, dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan serta penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap, kelautan dan pengembangan usaha;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas perikanan budidaya, perikanan tangkap, kelautan dan pengembangan usaha;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas; dan
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Dalam merumuskan kebijakan operasional dan eksploitasi kelautan serta melaksanakan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan operasional pengelolaan perikanan dan eksploitasi kelautan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum pengelolaan perikanan dan eksploitasi kelautan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dan eksplorasi kelautan meliputi kegiatan program, produksi dan konservasi, prasarana, usaha, eksplorasi kelautan serta unit pelaksanaan teknis dinas serta penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam sektor perikanan dan kelautan adalah:

1. Sub Urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu:
 - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

- b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Sub Urusan Perikanan Tangkap, yaitu:
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3. Sub Urusan Perikanan Budidaya, yaitu:

Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
4. Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu:

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5. Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran, yaitu:

Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Provinsi Jawa Barat sebagian daerah yang memiliki wilayah laut, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berwenang untuk mengelola sumber daya wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil pengelola sumber daya alam di dasar laut sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan pemerintah provinsi adalah:

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. Pengaturan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara struktural bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun struktur organisasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

- 2. Sub Bagian Keuangan
- 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Budidaya
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Sumberdaya
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi dan Sarana Penangkapan
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - 3. Seksi Prasarana Penangkapan
- e. Bidang Kelautan, membawahi:
 - 1. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi
 - 2. Seksi Konservasi dan Pemberdayaan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- f. Bidang Pengembangan Usaha, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan
 - 2. Seksi Standarisasi
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pemasaran

Dalam struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

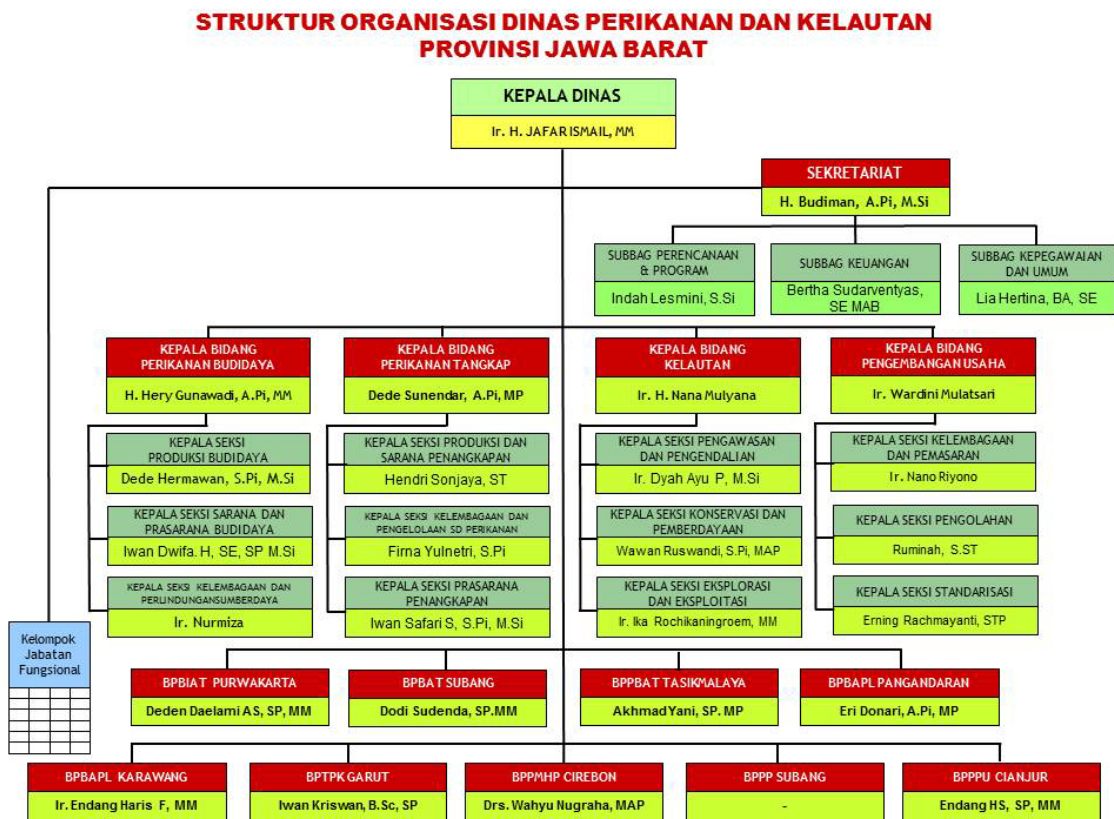
Adapun UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1. Balai Pengembangan Benih Ikan Nila dan Mas (BPBINM) di Wanayasa, Kabupaten Purwakarta
- 2. Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Selatan (BPBAPLWS) di Kabupaten Pangandaran
- 3. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele (BPBIPL) di Cijengkol, Kabupaten Subang
- 4. Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Utara (BPBAPLWU) di Sungai Buntu, Kabupaten Karawang
- 5. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Wilayah Selatan (BPPPWS) di Cilauteureun, Kabupaten Garut
- 6. Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) di Kota Cirebon
- 7. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Gurame dan Nilem (BPBIGN) di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
- 8. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Wilayah Utara (BPPPWU) di Muara Ciasem, Kabupaten Subang

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

9. Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias (BPPPUIH) di Ciherang, Kabupaten Cianjur

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2009 :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan **6 (Six) Core Business West Java** yang meliputi:

1. Pengembangan agribisnis dan agroindustri
2. Pengembangan industri manufaktur yang ramah lingkungan
3. Pengembangan industri jasa
4. Pengembangan marine bisnis
5. Pengembangan bisnis pariwisata
6. Pengembangan sumberdaya manusia

Sebagai bagian dari institusi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat berkewajiban mendukung upaya Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan *core business* pengembangan agribisnis dan agroindustri pengembangan marine bisnis.

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

1.4.2 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat per 1 Desember 2016 adalah 249 orang, berikut adalah kondisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin :

a. Berdasarkan jabatan struktural

Dari 249 orang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, yang menduduki jabatan struktural ada 54 orang, dengan rincian :

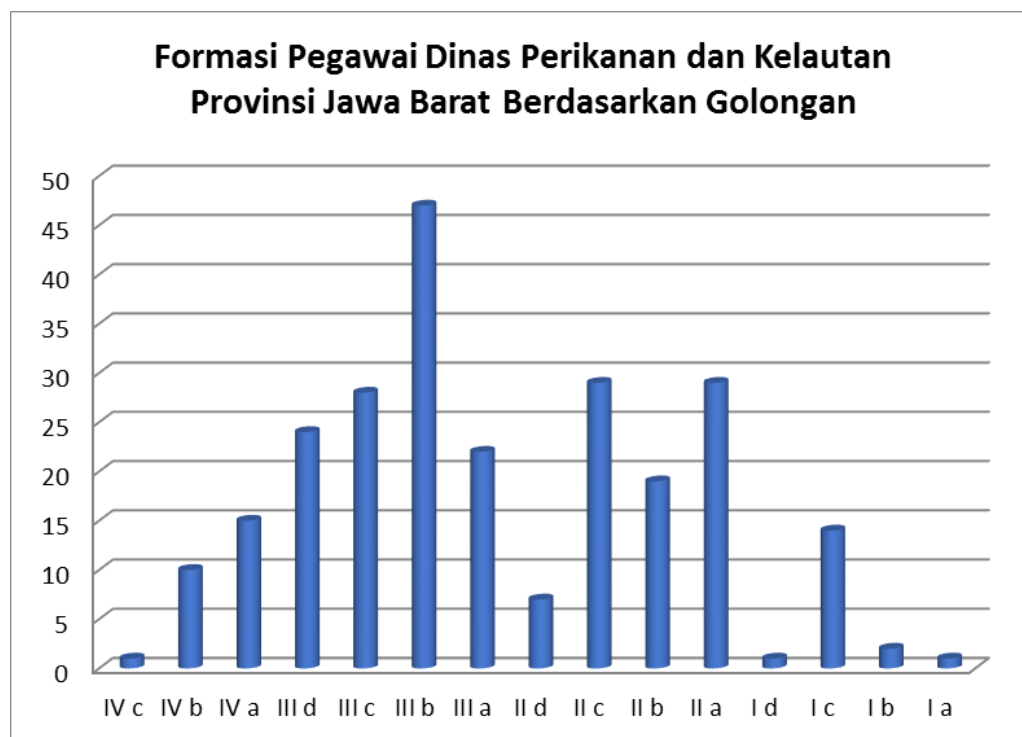
- 1) Pejabat eselon II : 1 orang
- 2) Pejabat eselon III : 14 orang
- 3) Pejabat eselon IV : 39 orang

b. Berdasarkan golongan

Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat, memiliki pegawai berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Golongan IV c : 1 orang
- 2) Golongan IV b : 10 orang
- 3) Golongan IV a : 15 orang
- 4) Golongan III d : 24 orang
- 5) Golongan III c : 28 orang
- 6) Golongan III b : 47 orang
- 7) Golongan III a : 22 orang
- 8) Golongan II d : 7 orang
- 9) Golongan II c : 29 orang
- 10) Golongan II b : 19 orang
- 11) Golongan II a : 29 orang
- 12) Golongan I d : 2 orang
- 13) Golongan I c : 14 orang
- 14) Golongan I b : 2 orang
- 15) Golongan I a : 1 orang

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT



Gambar 1.2. Formasi Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Berdasarkan Golongan

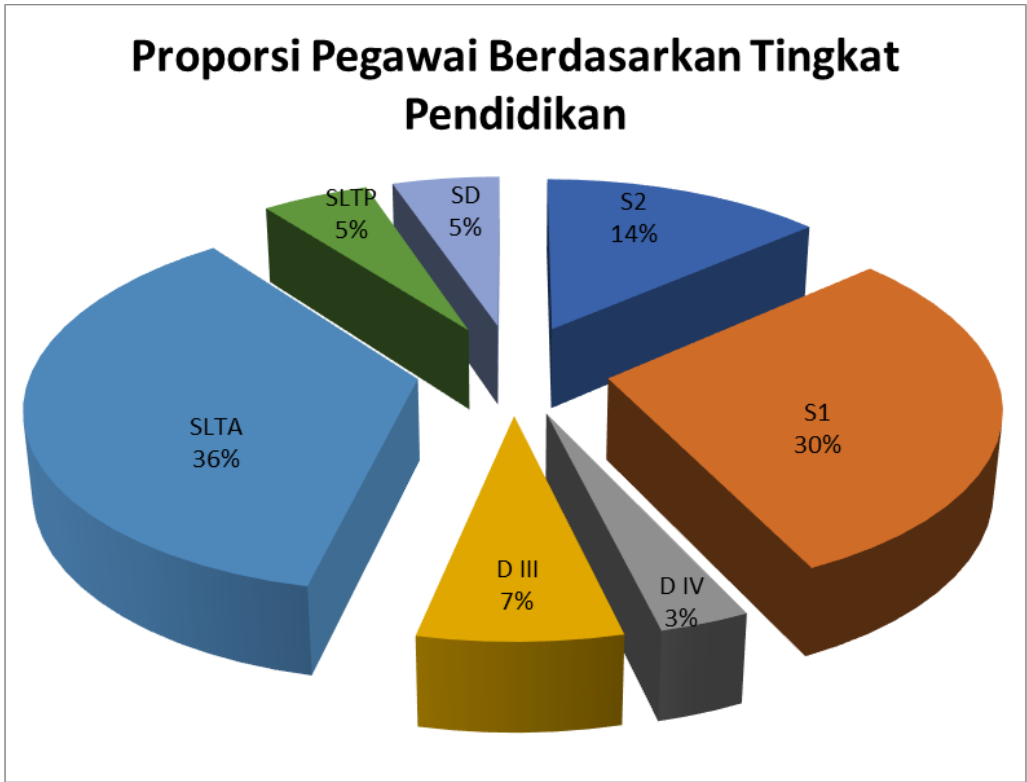
Dari gambar di atas, dapat dilihat, pegawai golongan III b di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah tertinggi dibandingkan golongan lainnya.

c. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dari 249 orang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dari SD hingga Pascasarjana dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pascasarjana (S2) : 34 orang
- 2) Sarjana (S1) : 73 orang
- 3) Diploma IV : 8 orang
- 4) Diploma III : 18 orang
- 5) SLTA sederajat : 90 orang
- 6) SLTP sederajat : 13 orang
- 7) SD : 13 orang

Proporsi pegawai berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.3. Proporsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat dengan tingkat pendidikan SLTA jumlahnya paling tinggi, sedangkan Diploma IV paling rendah.

d. Berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 198 orang dan perempuan 51 orang, perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



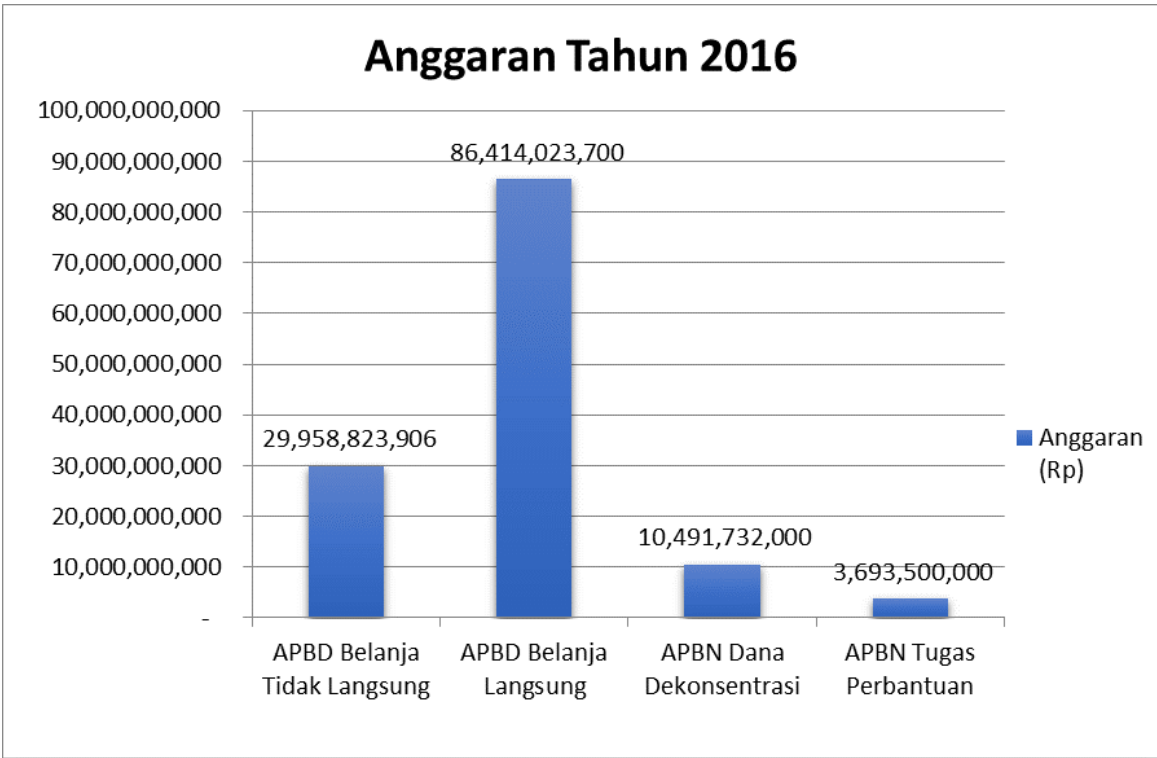
Gambar 1.4. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat didominasi oleh laki-laki.

1.4.3 Keuangan

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 mengelola anggaran APBD Provinsi Jawa Barat dan anggaran APBN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. APBD terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung, sedangkan APBN berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. Komposisi anggaran yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.5. Komposisi Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Tahun 2016

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa komposisi anggaran terbesar yang dikelola adalah APBD Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 86.414.023.700,00 atau 66.19% dari seluruh anggaran yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran dan membandingkannya dengan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Sistematika laporan ini meliputi :

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ikhtisar perjanjian Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 ini dengan Tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target jangka menengah (Tahun 2013 – 2018) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan di Tahun 2016 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2016 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.